

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Setiap negara mempunyai kewajiban mencerdaskan kehidupan warga negaranya tanpa terkecuali, Negara Indonesia sebagaimana diatur dalam Undang-undang Dasar 1945 mengamanatkan bahwa setiap warga negara berhak untuk mendapatkan pendidikan untuk mengembangkan potensi yang dimiliki secara optimal (Pasal 31 ayat 1). Upaya untuk melaksanakan amanat tersebut salah satunya diupayakan dengan mengeluarkan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional yang merupakan dasar hukum penyelenggaraan sistem pendidikan di Indonesia.

Pendidikan nasional berfungsi mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa. Tujuannya untuk berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab (UU No 20 tahun 2003, Pasal 3). Berdasarkan ketentuan tersebut, pemerintah pusat maupun daerah wajib memberikan layanan dan kemudahan, serta menjamin terselenggaranya pendidikan yang bermutu bagi setiap warga negara tanpa adanya diskriminasi, dan menjamin tersedianya dana guna terselenggaranya pendidikan bagi setiap warga

negara yang berusia tujuh sampai dengan lima belas tahun (UU No 20 tahun 2003, Pasal 11).

Selaras dengan ketentuan di atas, maka visi pendidikan nasional adalah untuk mewujudkan sistem pendidikan yang kuat dan berwibawa untuk memberdayakan semua warga negara Indonesia agar berkembang menjadi manusia yang berkualitas sehingga mampu dan proaktif menjawab segala tantangan zaman yang selalu berubah. Salah satu kebijakan pemerintah dalam mewujudkan visi tersebut dengan upaya peningkatan mutu penyelenggaraan pendidikan, antara lain dengan mengeluarkan program dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) untuk peningkatan kualitas proses pembelajaran. Program BOS ini merupakan kebijakan publik di bidang pendidikan yang bertujuan untuk memberikan bantuan kepada masyarakat agar bisa menikmati pendidikan dasar dan menengah. Selain itu pemerintah juga mengeluarkan program Bantuan Siswa Miskin (BSM), program ini secara garis besar bertujuan pemberi pengaman agar program pemerintah dalam penuntasan wajib belajar dua belas tahun berjalan lancar.

Program bantuan pendidikan dimaksudkan, agar dapat meningkatkan mutu pendidikan dan sumber daya manusia, akan tetapi dalam pelaksanaannya sampai saat ini masih dihadapkan pada berbagai permasalahan dan hambatan sehingga implementasinya tidak dapat berjalan sesuai dengan harapan. Salah satunya seperti di SMA Negeri 5 Halmahera Timur penyaluran BSM tidak tepat sasaran, seharusnya diperuntukan bagi siswa miskin tetapi yang mendapatkan BSM adalah siswa yang memiliki latar belakang ekonomi cukup “berduit” (poskomalut.com,

Maret 2014). Di Lampung Utara banyak warga miskin yang tidak menerima bantuan dan dana BSM, karena diduga dipotong pihak sekolah untuk kepentingan pribadi, menurut pengakuan salah satu wali murid siswa di SDN II Dorowati Kecamatan Abung Timur dari bantuan sebesar Rp. 425.000,00 dipotong pihak sekolah sebesar Rp. 65.000,00 dengan alasan Rp. 50.000,00 untuk pihak sekolah dan Rp. 15.000,00 untuk formulir pencairan (detiklampung.com, Januari 2014).

Searah dengan tujuan pendidikan nasional, pemerintah kota Surakarta menyelenggarakan Program Bantuan Pendidikan Masyarakat Kota Surakarta (BPMKS). Penyelenggaraan Program BPMKS dimaksudkan agar warga usia sekolah atau peserta didik dapat terlayani dan mengakses pendidikan berkualitas pada jenjang pendidikan dasar dan pendidikan menengah, baik negeri dan swasta. Dasar hukum dalam pelaksanaan BPMKS adalah Peraturan Walikota Nomor 6-B Tahun 2011 Tentang Bantuan Pendidikan Masyarakat Kota Surakarta dan kemudian diperbarui dengan Perwali Nomor 11-A Tahun 2012. Sasaran yang mendapatkan BPMKS adalah Penduduk Kota Surakarta yang bertempat tinggal tetap dan bersekolah di Kota Surakarta.

Namun setelah penyelenggaraan BPMKS di kota Surakarta masih ditemukan adanya siswa yang putus sekolah atau tidak melanjutkan hingga tingkat akhir disebabkan berbagai macam faktor, salah satunya ekonomi. Berikut data angka putus sekolah tiap satuan pendidikan di Surakarta, dapat dilihat pada tabel 1 berikut ini.

Tabel 1. Jumlah Siswa Putus Sekolah di Kota Surakarta
Tahun Ajaran 2009/2010 s.d 2011/2012

No.	Tahun Ajaran	Putus Sekolah Tiap Tingkatan							Jumlah
		SD	MI	SMP	MTs	SMA	MA	SMK	
1	2009/2010	32	-	117	20	12	11	181	373
2	2010/2011	25	-	27	-	69	5	32	158
3	2011/2012	28	-	182	1	45	8	244	508

Sumber: Disdikpora Surakarta (2013)

Melihat data angka siswa putus sekolah tiap tahunnya masih tinggi, menunjukkan bahwa pelaksanaan BPMKS belum optimal. Berdasarkan permasalahan yang dikemukakan di atas terdapat kesenjangan antara harapan dari bantuan pendidikan dengan realitasnya, hal ini menarik untuk diteliti.

BPMKS merupakan salah satu upaya pemerintah Kota Surakarta untuk mewujudkan tujuan pendidikan nasional, karena pendidikan adalah pilar utama dalam pembangunan dan kemajuan suatu bangsa, sekaligus hak setiap warga negara untuk memperolehnya. Hak pendidikan tersebut diatur secara tegas dalam UUD 1945 pasal 31 ayat 1: “Setiap warga Negara berhak mendapat pendidikan”.

Juga ditegaskan dalam pasal 28 C ayat 1:

“Setiap orang berhak mengembangkan diri melalui pemenuhan kebutuhan dasarnya, berhak mendapat pendidikan dan memperoleh manfaat dari ilmu pengetahuan dan teknologi, seni dan budaya, demi meningkatkan kualitas hidupnya dan demi kesejahteraan umat manusia”

Berdasarkan ketentuan tersebut menegaskan bahwa pendidikan menjadi hak warga negara sekaligus kewajiban konstitusional negara untuk memfasilitasi. Hak mendapatkan pendidikan di atas merupakan hak asasi manusia yang diatur dalam UU No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia yang menegaskan:

“Seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan anugrah-Nya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi dan dilindungi oleh negara hukum,

Pemerintahan, dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia” (Pasal 1).

Hak asasi manusia merupakan salah satu materi yang diajarkan dalam mata pelajaran Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (PPKn). Hal ini relevan untuk diteliti, karena peneliti adalah mahasiswa Prodi PPKn FKIP UMS sekaligus calon guru mata pelajaran PPKn. Sehingga perlu memiliki dan menguasai materi hak asasi manusia yang dimaksud.

Berdasarkan latar belakang tersebut, peneliti merasa terdorong untuk mengadakan penelitian mengenai “Implementasi Bantuan Pendidikan Masyarakat, Studi Kasus Di SMP Muhammadiyah 10 Surakarta Berdasarkan Perda No. 11-A Tahun 2012 Tentang BPMKS”.

B. Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka dapat dirumuskan permasalahan penelitian sebagai berikut:

1. Bagaimanakah implementasi Bantuan Pendidikan Masyarakat Kota Surakarta di SMP Muhammadiyah 10 Surakarta?
2. Faktor apa saja yang menjadi kendala dalam pelaksanaan Bantuan Pendidikan Masyarakat Kota Surakarta di SMP Muhammadiyah 10 Surakarta?
3. Bagaimana solusi dalam menghadapi kendala pelaksanaan Bantuan Pendidikan Masyarakat Kota Surakarta di SMP Muhammadiyah 10 Surakarta?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah di atas, maka dapat dirumuskan tujuan penelitian sebagai berikut:

1. Untuk mendiskripsikan implementasi Bantuan Pendidikan Masyarakat Kota Surakarta di SMP Muhammadiyah 10 Surakarta.
2. Untuk mendiskripsikan faktor yang menjadi kendala dalam pelaksanaan Bantuan Pendidikan Masyarakat Kota Surakarta di SMP Muhammadiyah 10 Surakarta.
3. Untuk mendiskripsikan solusi dalam menghadapi kendala pelaksanaan Bantuan Pendidikan Masyarakat Kota Surakarta di SMP Muhammadiyah 10 Surakarta.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

- a. Memberikan masukan untuk perkembangan konsep mengenai kebijakan publik khususnya mengenai implementasi BPMKS di SMP Muhammadiyah 10 Surakarta.
- b. Sebagai bahan masukan bagi penelitian selanjutnya, khususnya mengenai pelaksanaan bantuan pendidikan atau kebijakan publik umumnya.

2. Manfaat Praktis

- a. Bagi masyarakat, hasil penelitian ini memberikan informasi mengenai bagaimana implementasi, kendala, dan solusi pelaksanaan BPMKS.
- b. Bagi Pemerintah Daerah, hasil dari penelitian ini sebagai bahan dalam upaya meningkatkan efektivitas implementasi BPMKS.

- c. Bagi peneliti, hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai wawasan baru mengenai kebijakan publik yang dilakukan Pemerintah Daerah.

E. Daftar Istilah

1. Bantuan Sosial

Bantuan sosial dapat diberikan kepada seseorang, keluarga, dan atau masyarakat yang mengalami guncangan dan kerentanan sosial dapat tetap hidup wajar, secara sementara dan atau berkelanjutan dalam bentuk bantuan langsung (Rahayu, 2012:124), atau pemberian bantuan berupa uang/barang dari pemerintah daerah kepada individu, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat yang sifatnya tidak secara terus menerus dan bersifat selektif, yang bertujuan untuk melindungi dari kemungkinan terjadinya resiko sosial (Permendagri No. 32 Tahun 2011). Jadi bantuan sosial (bansos) merupakan pemberian bantuan berupa uang atau barang yang diberikan kepada seseorang, keluarga, dan masyarakat yang mengalami resiko sosial.

2. Pendidikan

Pendidikan merupakan pembinaan, pengembangan kemampuan, peningkatan pengetahuan dari tidak tahu menjadi tahu, serta tujuan kearah mana peserta didik dapat mengaktualisasikan dirinya seoptimal mungkin (Suwarno, 2006:22), atau bimbingan secara sadar dari pendidik terhadap perkembangan jasmani dan rohani anak didik menuju terbentuknya manusia yang memiliki kepribadian yang utama dan ideal (Jalaludin dan Idi, 2011:7).

Jadi pendidikan mencakup kegiatan mendidik, mengajar, melatih dan meningkatkan serta mengembangkan pengetahuan dan keterampilan manusia.

3. Masyarakat

Masyarakat disebut *society* (Bahasa Inggris), asal katanya *socius* yang berarti kawan, atau *syrik* (Bahasa Arab), artinya bergaul. Saling bergaul ditata berdasar aturan hidup, yang bukan disebabkan oleh manusia sebagai perseorangan, melainkan oleh unsur-unsur kekuatan lain dalam lingkungan sosial yang merupakan kesatuan (Soelaeman, 1998:63). Konsep lain disebut kelompok manusia yang saling berinteraksi yang memiliki prasarana untuk kegiatan tersebut dan adanya saling keterikatan untuk mencapai tujuan bersama (Ahmadi, 1986:80). Rumusan lain menyatakan bahwa masyarakat adalah orang-orang yang hidup bersama yang menghasilkan kebudayaan (Soemardjan dalam Soekanto, 2009:22). Dengan demikian masyarakat merupakan sekelompok manusia yang hidup bersama membentuk lingkungan social dan saling berinteraksi untuk mencapai suatu tujuan bersama.

4. BPMKS

BPMKS kepanjangannya adalah Bantuan Pendidikan Masyarakat Kota Surakarta merupakan bantuan pendidikan untuk penduduk Kota Surakarta yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Surakarta. BPMKS diselenggarakan berdasarkan asas keterjangkauan layanan dan pemerataan supaya penduduk usia sekolah dan peserta didik dapat mengakses pendidikan yang berkualitas (Perwali No. 11-A Tahun 2012 Tentang BPMKS .